



Acara bedah buku *Kebijakan Pariwisata: Sebuah Pengantar untuk Negara Berkembang* yang digelar di Kantor Badan Otorita Borobudur, Jogja, Kamis (9/5).

► **PENGEMBANGAN WISATA**

Kebijakan Berperan Penting untuk Kemajuan Pariwisata

JOGJA—Kebijakan dinilai memiliki peranan penting bagi kemajuan pariwisata. Hal ini dikupas dalam bedah buku *Kebijakan Pariwisata: Sebuah Pengantar untuk Negara Berkembang* kerja sama Badan Otorita Borobudur (BOB) dan penulis buku Riant Nugroho di Badan Otorita Borobudur, Jogja, Kamis (9/5).

Pakar kebijakan publik sekaligus staf ahli Menteri Pariwisata, Riant Nugroho, mengatakan saat ini Indonesia hanya memiliki politik pariwisata dan strategi pariwisata. Dua hal ini kekurangan bagian penghubung yakni kebijakan pariwisata. "Pariwisata bisa terangkat dengan cepat caranya dengan memperbaiki kebijakan dan menginjeksi dengan teknologi terkini. Indonesia masih di strategi," kata Riant di sela-sela bedah buku *Kebijakan Pariwisata: Sebuah Pengantar untuk Negara Berkembang* di Kantor Badan Otorita Borobudur, Jogja, Kamis.

Ia mengatakan untuk memajukan pariwisata hal yang dibutuhkan yakni memperbaiki kebijakan pariwisata dan kepariwisataan. Dibutuhkan kebijakan pariwisata kolaborasi dengan kementerian lain sehingga pembangunan pariwisata bisa lebih maksimal.

● Lebih Lengkap Halaman 16

Kebijakan Berperan...

"Pariwisata tidak hanya milik Kementerian Pariwisata. Kami hanya rohnya saja. Sektornya kami serahkan ke kementerian-kementerian lain sehingga pembangunan pariwisata lebih terintegrasi," kata dia.

Pemerintah terus memacu pertumbuhan sektor pariwisata sebagai bisnis negara. Bentangan alam dan budaya yang beragam di Nusantara menjadi andalan sebagai daya tarik wisatawan mancanegara serta domestik. Berbagai kebijakan strategis dilakukan untuk mendongkrak kunjungan wisman dan raihan devisa sekaligus meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

Menurut Riant, persoalan mutu dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di berbagai lapisan birokrasi kepariwisataan atau kolaborasi manajemen lintas spasial dan lintas institusional yang macet adalah sedikit dari faktor yang menghambat pembangunan pariwisata.

Kepala Pusat Studi Pariwisata (Puspar) UGM, Janianton Damanik, mengatakan tema ini diangkat sebagai bahan diskusi tak terlepas dari kebutuhan untuk membuat pariwisata maju dan dikelola dengan baik.

"Pilar-pilar untuk memajukan pariwisata ada di kebijakan sehingga ini harus menjadi perhatian bersama," kata dia.

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi, mengapresiasi bedah buku ini sehingga bisa memetakan kebijakan yang diperlukan untuk mengembangkan pariwisata khususnya Jogja.

"Sebentar lagi bandara YIA dibuka dan tahun ini sudah *full* operasional. Awal-awal ini masih minimum. Yang harus diantisipasi adalah diharapkan Jogja akan dapat limpahan wisatawan dari Bali dan

Jakarta," kata dia.

Ia menekankan persoalan pariwisata bukan pada persaingan antardaerah tetapi jaringan. Jika berebut, maka ada pihak yang terluka. Pariwisata yang ingin dikembangkan adalah pariwisata saling berbagi dan bukan saling berebut.

"Kami ingin antardaerah bisa terkoneksi untuk pariwisata sehingga bisa maju. Dua tahun ini Jogja berbenah. Kami ingin ubah wajah Jogja agar lebih ramah sehingga yang datang ke Jogja bisa merasa nyaman," tutur dia. (Kusnul Isti Qomah)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005